

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta, 2009.

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. McGraw-Hill, Bandung, 1978.

Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Buku Kesatu, Cet II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016

Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibiidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010

Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994

M. Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2017.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan embentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006

Mariam Darius Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung, 2014.

Markus Gunawan, *Problematika Multidimensia*, Karya Mandiri, Batam, 2004

Metika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008

Ni"matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung. 2011

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Agam, PT. Bina Ilmu, 1987

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2005

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998

Saifulllah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris Indonesia*, Jakarta 1990.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group. Jakarta, 2015

Jurnal:

Ahmad Arizal Mukti dan Oci Senjaya. *Tanggung Jawab PPAT Secara Pribadi Terhadap Batalnya Akta Jual Beli Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Hukum POSITUM 5, no. 2 (2020): 66–78.

Dewi Kurnia Putri, Dan Amin Purnawan "Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas," Jurnal Akta, unissul, Vol.4, No.4, 2017, hlm.633.

Mika Anabelle dan Flora Dianti. *Tanggungjawab Notaris/Ppat Mengenai Akta Simulasi Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Kertha Semaya 9, No. 11 (2021): 2169–83.

Renti Maharaini Kerti, “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen” Jurnal Legislasi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Vol.15, No.2, 2018, hlm. 41-54.

Yodiniya, Sausan, Yani Pujiwati, and Betty Rubiati. “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Untuk Pertokoan Dengan Status Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 3, No. 2 (2020): 241-256.

Yohannes Sogar Simamora, Penerapan Prinsip Caveat Vendor Sebagai Sara Perlindungan Bagi Konsumen Perumahan di Indonesia, Universitas Airlangga Press, Agam, 1996

Panca Basuki Rahmat, Hanif Nur Widhiyanti, Erna Anggraini, “Akibat Hukum Jual Beli Apartemen sistem Pesan banguyang tidak dibuat dalam akta Notaris”. Jurnal Suara Hukum vol. 4 no.2,(2022):397-407

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman